

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum media online Detikcom dan Merdeka.com serta akan diuraikan analisa pemberitaan tentang gerakan #2019GantiPresiden edisi bulan Agustus 2018. Adapun analisis framing berikut ini akan membandingkan antara data yang diperoleh dari Detikcom dengan data yang diperoleh dari Merdeka.com. Sehingga dapat diketahui berapa banyak persentase penyajian berita yang pro dan kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden di media online Detikcom dan Merdeka.com serta dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman nantinya akan diketahui bagaimana kedua media online tersebut membingkai pemberitaan.

A. Gambaran Umum Detikcom dan Merdeka.com

1. Media Online Detikcom

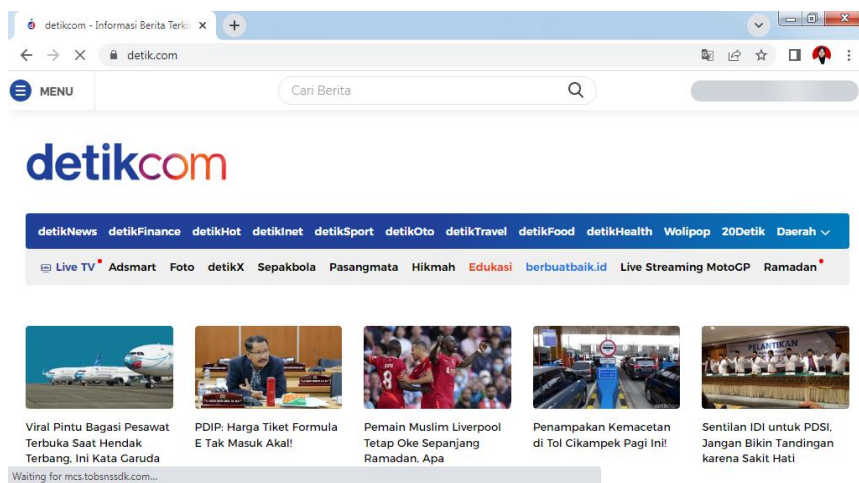


Gambar 4.1
Logo Media Online Detikcom

J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah dalam buku *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*, menjelaskan bahwa detikcom merupakan pelopor media online di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami perubahan sosial politik. Detikcom diluncurkan dengan modal awal sebanyak empat puluh juta rupiah. Pelopor media online pertama di Indonesia tersebut menerapkan pemberitaan yang ringkas dan cepat.

Adapun berdasarkan sejarahnya, www.detik.com diunggah pertama kali pada 9 Juli 1998 dengan digagas oleh empat sekawan yaitu Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugraha. Tidak ada media cetak yang mengindukinya, sehingga dapat dimengerti bahwa Detik muncul sebagai media online otonom.³⁴ Saat ini media online detikcom beralamat di Gedung Transmedia lantai 8-9 Jln. Kapten Tendean kav. 12-14A, Jakarta Selatan, 12790. Nomor telepon redaksi yang dapat dihubungi yakni: (021) 7918 7722. Email redaksi detikcom yang dapat dihubungi yakni: [redaksi\[at\].detik.com](mailto:redaksi[at].detik.com). Serta Fax melalui: (021) 7918 7727.

Ketika mengakses detikcom dengan url www.detik.com, akan muncul tampilan seperti pada tangkapan layar berikut ini:



Gambar 4.2
Halaman Awal Detikcom

³⁴ J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, tt), h.17.

Dalam tangkapan layar di atas, terdapat pilihan untuk mengakses rubrik pemberitaan yang ada di Detikcom. Masing-masing jenis rubrik tersebut berisikan liputan yang berbeda.

- a. detikNews merupakan rubrik yang memuat pemberitaan politik dan peristiwa.
- b. detikFinance merupakan rubrik yang berisikan pemberitaan ekonomi dan keuangan.
- c. detikHot merupakan rubrik yang berisikan pemberitaan artis, selebriti, dan seputar infotainment.
- d. detikInet merupakan rubrik yang berisikan pemberitaan mengenai teknologi informasi.
- e. detikSport merupakan rubrik yang berisikan pemberitaan mengenai informasi olahraga.
- f. detikOto merupakan rubrik yang berisikan informasi mengenai otomotif.
- g. detikTravel merupakan rubrik yang berisikan informasi mengenai liburan dan pariwisata.
- h. detikFood merupakan rubrik yang berisikan informasi mengenai makanan dan kuliner.
- i. detikHealth merupakan rubrik yang berisikan mengenai informasi dan artikel kesehatan.
- j. Wolipop merupakan rubrik yang berisikan informasi mengenai *lifestyle* atau gaya hidup.
- k. 20Detik merupakan rubrik yang berisikan liputan singkat dengan tampilan berupa foto, video, dan narasi singkat
- l. Daerah merupakan rubrik liputan berita dari berbagai daerah. Di antaranya; daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bali.

2. Media Online Merdeka.com

Merdeka.com didirikan pada tanggal 21 Februari 2012 oleh Eka Wiharto di bawah naungan PT. Integra Ventura. Situs merdeka.com adalah www organization, yaitu organisasi yang hidup di internet. Internet hidup, berkembang, dan memberi inspirasi, dimana merdeka.com menjadi bagiannya dan member kontribusi, terutama untuk internet Indonesia. Merdeka.com adalah hasil kolaborasi antara media dan teknologi. Kebanyakan media online dibangun sebagai bagian dari pengembangan perusahaan media, atau dibangun oleh orang-orang media. Tetapi merdeka.com justru dibangun oleh perusahaan teknologi yang terdiri dari orang-orang yang mengerti PHP & Apache/FreeBSD lebih dulu daripada ilmu jurnalistik.³⁵

Merdeka.com adalah anak atau pengembangan dari situs KapanLagi.com yang berfokus pada layanan internet yang dapat dinikmati jutaan orang dan kemudian berkembang menjadi perusahaan teknologi dan media yang fokus pada dunia entertainment, sedangkan merdeka.com memfokuskan diri pada berita politik dan peristiwa.

Kantor media online merdeka.com beralamat di Jl. Tebet Barat IV No.3 Jakarta Selatan, 12810. Email redaksi yang dapat dihubungi yakni redaksi@merdeka.com. Selain itu, dapat juga menghubungi melalui layanan telepon: (021) 8379 52 45, dan melalui Fax: (021) 8379 52 46.

³⁵ Data Pribadi Merdeka.com

a. Visi dan Misi Merdeka.com

Visi merdeka.com yaitu “Merdeka Berkreasi”, dengan artian bagaimana menyajikan informasi yang sebenarnya dan enak dinikmati. Misi merdeka.com yaitu cepat dalam menyajikan berita dari media online lainnya, dapat mengakses situs merdeka.com dengan cepat, berita yang disampaikan akurat dan sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Logo Merdeka.com



Gambar 4.3
Logo Media Online Merdeka.com

Logo media online merdeka.com beranekaragam warna. Warna-warni dari logo merdeka.com memiliki arti sebagai warna kebebasan dalam menyampaikan informasi, tidak terikat oleh paham tertentu atau kepentingan tertentu. Tetapi dasar yang putih (atau hitam, di saat tertentu) mendasari itikad untuk selalu ada di jalur yang benar, bukan seenaknya sendiri. Tujuannya adalah menjadi sebuah media yang bisa diakses jutaan orang melalui teknologi, tanpa batasan atau dibatasi, karena: tidak ada yang lebih berharga dari pada menjadi merdeka (tanpa dot com).

B. Analisis Data

1. Tabel Pro dan Kontra Gerakan #2019GantiPresiden

Pemberitaan pro dan kontra gerakan #2019GantiPresiden pada media online detikcom dan merdeka.com yang penulis analisis merupakan berita pada bulan Agustus tahun 2018. Waktu pemberitaan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan bahwa bulan Agustus tahun 2018 masuk dalam perhitungan kurang dari satu bulan masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan, yakni dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

a. Pro dan Kontra di Detikcom

Tabel 4.1
Berita Pro Gerakan #2019GantiPresiden di Detikcom

No	Tanggal	Judul Berita
1	02 Agustus 2018, 08:20	Gerindra Protes MUI Jabar Sebut #2019GantiPresiden Provokasi
2	06 Agustus 2018, 13:40	Mardani: Deklarasi #2019GantiPresiden di Serang Jalan Terus
3	06 Agustus 2018, 22:35	Ramai Penolakan, #2019GantiPresiden Jalan Terus
4	08 Agustus 2018, 13:48	Ditolak, Deklarasi #2019GantiPresiden Tetap Digelar di Jabar
5	08 Agustus 2018, 14:10	Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak di Jabar, Ini Kata Panitia
6	12 Agustus 2018, 13:27	Massa di Makassar Berkumpul Deklarasi #2019gantipresiden

7	12 Agustus 2018, 15:06	Neno Warisman: Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Tak Bahaya
8	21 Agustus 2018, 14:32	Mardani Rilis Buku #2019GantiPresiden, Ada Strategi Pemenangan
9	24 Agustus 2018, 19:45	Deklarasi #2019GantiPresiden di Riau Ditunda
10	24 Agustus 2018, 21:13	Deklarasi #2019GantiPresiden Sangkal Diboncengi Gerakan Khilafah
11	25 Agustus 2018, 11:57	Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya Ngotot Tetap Digelar
12	25 Agustus 2018, 14:25	Gerindra Heran Polisi Tak Beri Izin Diskusi #2019GantiPresiden
13	25 Agustus 2018, 18:26	Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Ada Izin, Ahmad Dhani: Emang Perlu?
14	25 Agustus 2018, 19:23	Ahmad Dhani Jamin Deklarasi #2019GantiPresiden Berlangsung Damai
15	25 Agustus 2018, 20:42	Fadli Zon Kritik Penghadangan Neno: Sebaiknya Kapolda Riau Dicipot
16	26 Agustus 2018, 07:55	Peserta Deklarasi #2019GantiPresiden Berdatangan di Tugu Pahlawan
17	26 Agustus 2018, 08:32	Dibubarkan, Massa #2019GantiPresiden Keliling Tugu Pahlawan
18	26 Agustus 2018, 11:23	Deklarasi #2019GantiPresiden Dibubarkan, Ini Kata Ahmad Dhani
19	26 Agustus 2018, 11:33	#2019GantiPresiden Ditolak, Mardani: Negara Kalah oleh Preman
20	26 Agustus 2018, 14:34	Mardani Jawab Andi Arief: #2019GantiPresiden Gerakan Rakyat

21	26 Agustus 2018, 14:48	Relawan Deklarasi #2019GantiPresiden Tuduh Polisi Tidak Adil
22	26 Agustus 2018, 15:02	Mardani Hadiri Deklarasi #2019GantiPresiden di Pontianak
23	26 Agustus 2018, 15:11	PA 212 Kecam Persekusi Terhadap Neno Warisman di Riau
24	26 Agustus 2018, 16:04	#2019GantiPresiden Tak Bawa Nama Prabowo, Ini Kata Mardani
25	26 Agustus 2018, 16:22	Dibubarkan, Massa #2019GantiPresiden Ultimatum Polri
26	26 Agustus 2018, 17:07	Fadli Zon: Kok Ahmad Dhani Dipersekusi di Hotel?
27	26 Agustus 2018, 18:24	Puisi #2019GantiPresiden Dilelang Rp 1,5 Juta untuk Korban Gempa NTB
28	27 Agustus 2018, 10:09	#2019GantiPresiden Disebut Banci, Gerindra #2019PrabowoPresiden
29	27 Agustus 2018, 11:05	Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, PAN: Buat Saja Tandingan
30	27 Agustus 2018, 14:05	BIN Terlibat Pemulangan Neno Warisman, Gerindra: Intel Melayu
31	27 Agustus 2018, 14:10	#2019GantiPresiden Dianggap Makar, Gerindra: Ah, Bisa-bisa Aja
32	27 Agustus 2018, 14:28	Demokrat: Ekspresi Gerakan #2019GantiPresiden Tak Perlu Ditakuti
33	27 Agustus 2018, 14:28	Demokrat: Ekspresi Gerakan #2019GantiPresiden Tak Perlu Ditakuti
34	27 Agustus	#2019GantiPresiden Ditolak, Ahmad Dhani:

	2018, 14:36	Demokrasi Kriminal
35	28 Agustus 2018, 10:43	Bawaslu: Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Langgar Aturan Pemilu
36	28 Agustus 2018, 11:52	Gerindra: Tudingan #2019GantiPresiden Makar Usaha Cari Muka
37	28 Agustus 2018, 12:42	Koalisi Prabowo Akan Beri Pernyataan soal #2019GantiPresiden
38	28 Agustus 2018, 14:30	KPU: Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Masuk Kampanye
39	28 Agustus 2018, 19:23	#2019GantiPresiden Dihadang, Fahri: RI Jadi State Creator Terror
40	28 Agustus 2018, 23:45	Akbar Tandjung: Tak Ada Alasan Bubarkan Aksi #2019GantiPresiden
41	29 Agustus 2018, 06:29	KPU-Bawaslu 'Izinkan' #2019GantiPresiden
42	29 Agustus 2018, 09:06	#2019GantiPresiden, Gerindra Minta Pemerintah Tak Parno
43	29 Agustus 2018, 18:53	Din: Gerakan #2019GantiPresiden Tidak Boleh Dihalang-halangi
44	30 Agustus 2018, 08:41	Deklarator #2019GantiPresiden Tanggapi #2019KitaTetapBersaudara
45	30 Agustus 2018, 09:59	Gerakan #2019GantiPresiden Dihadang, Ini Kata Sandiaga Uno
46	30 Agustus 2018, 13:26	Deklarasi #2019GantiPresiden akan Digelar di Aceh
47	31 Agustus 2018, 19:00	Sandiaga ke Penolak #2019GantiPresiden: Jangan Persekusi Emak-emak

Tabel 4.2
Berita Kontra Gerakan #2019GantiPresiden di Detikcom

No	Tanggal	Judul Berita
1	02 Agustus 2018, 11:04	Dukung MUI Jabar Tolak #2019GantiPresiden, PDIP: Cara Barbar Tinggalkan
2	02 Agustus 2018, 15:34	Tolak Gerakan #2019GantiPresiden, MUI Jabar Tegaskan Netral
3	02 Agustus 2018, 20:34	MUI Daerah Menolak #2019GantiPresiden
4	03 Agustus 2018, 09:10	Sikap MUI Jabar Lawan Gerakan #2019GantiPresiden
5	06 Agustus 2018, 12:16	Pemkot Serang Tidak Izinkan Deklarasi #2019GantiPresiden
6	06 Agustus 2018, 12:38	Serang Tak Izinkan Deklarasi #2019GantiPresiden, Panitia Protes
7	08 Agustus 2018, 10:57	Baliho Tolak Neno Warisman Muncul di Makassar
8	16 Agustus 2018, 14:45	Mahasiswa Bandung Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden
9	23 Agustus 2018, 17:51	Massa Kembali Demo Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Riau
10	24 Agustus 2018, 13:38	Kapolda Riau ke Panitia Deklarasi #2019GantiPresiden: Batalkan!
11	24 Agustus 2018, 15:09	Jika Deklarasi #2019GantiPresiden Tetap Digelar, Ini Tindakan Polisi
12	24 Agustus 2018, 17:08	Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Mahasiswa Ngeluruk Polda Jatim

13	24 Agustus 2018, 18:48	Pemuda Pancasila Siap Bubarkan Aksi #2019GantiPresiden di Surabaya
14	25 Agustus 2018, 12:46	Diskusi Ratna Sarumpaet Ditolak di Babel karena Bahas Ganti Presiden
15	25 Agustus 2018, 18:59	Bicara Deklarasi #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani Didemo Mahasiswa
16	26 Agustus 2018, 08:11	Polisi Bubarkan Massa Deklarasi #2019Ganti Presiden di Surabaya
17	26 Agustus 2018, 08:15	Tak Beri Izin Aksi #2019GantiPresiden, Polri: Belum Masa Kampanye
18	26 Agustus 2018, 08:52	Massa Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya Dilempari Batu
19	26 Agustus 2018, 09:03	Aksi #2019GantiPresiden Dibubarkan, ke Mana Ahmad Dhani dan Neno?
20	26 Agustus 2018, 09:23	Lawan Arus, Massa Bergerak Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden
21	26 Agustus 2018, 09:33	Hotel Ahmad Dhani Menginap Dikepung Massa Tolak #2019GantiPresiden
22	26 Agustus 2018, 10:43	Pembubaran Massa Deklarasi #2019GantiPresiden, Seorang Polwan Luka
23	26 Agustus 2018, 12:11	Massa Tolak #2019GantiPresiden Minta Ahmad Dhani Tinggalkan Surabaya
24	26 Agustus 2018, 12:24	Mardani Sebut Negara Kalah oleh Preman, Ini Kata PKB
25	26 Agustus 2018, 13:03	Dikepung, Ahmad Dhani Serang Massa Tolak #2019GantiPresiden

26	26 Agustus 2018, 13:18	Soal #2019GantiPresiden, NasDem: Neno yang Persekusi Presiden!
27	26 Agustus 2018, 14:05	Ansor Imbau Penolak Aksi #2019GantiPresiden Tetap Berpolitik Santun
28	26 Agustus 2018, 14:13	Dikepung Massa Anti #2019GantiPresiden, Jumpa Pers Ahmad Dani Batal
29	26 Agustus 2018, 15:31	Ahmad Dhani Terus Dikejar Massa Tolak #2019GantiPresiden di Surabaya
30	26 Agustus 2018, 16:31	Polisi Bubarkan Massa #2019GantiPresiden di Pekanbaru
31	26 Agustus 2018, 17:04	Bubarkan #2019GantiPresiden, Polisi: Penyampaian Pendapat Diatur UU
32	26 Agustus 2018, 18:26	#2019GantiPresiden Gerakan Banci, Banser Tak Ikut Penolakan
33	27 Agustus 2018, 08:49	Gagalnya Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya yang Berujung Ricuh
34	27 Agustus 2018, 09:04	Penolakan untuk Neno Warisman: Batam hingga Pekanbaru
35	27 Agustus 2018, 10:43	PSI: #2019GantiPresiden Sebar Kebencian ke Presiden
36	27 Agustus 2018, 11:40	PKB: #2019GantiPresiden Jelas Ada Unsur Kebencian
37	27 Agustus 2018, 12:11	NasDem: #2019GantiPresiden Kebebasan Berpendapat yang Keliru
38	27 Agustus 2018, 12:41	Jubir Istana: #2019GantiPresiden Makar!
39	27 Agustus	Ngabalin: Jangan Kemas Pengajian dengan

	2018, 13:21	#2019GantiPresiden!
40	27 Agustus 2018, 13:27	Timses Jokowi soal Tagar Tandingan: #2019JanganPilihPresidenJomblo?
41	27 Agustus 2018, 13:43	Hanura: Deklarasi #2019GantiPresiden Sengaja Melanggar UU
42	27 Agustus 2018, 14:14	PDIP soal #2019GantiPresiden: Untung Presidennya Jokowi
43	27 Agustus 2018, 14:18	OSO soal #2019GantiPresiden: Belum Kampanye Sudah Lakukan Kebencian
44	27 Agustus 2018, 15:58	Golkar: Gerakan #2019GantiPresiden Cara Curi Start Kampanye
45	27 Agustus 2018, 16:34	Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Luhut: Daripada Bentrok
46	27 Agustus 2018, 18:30	BIN Terlibat Pemulangan Neno Warisman, Ini Kata Mardani
47	28 Agustus 2018, 00:28	Laporan Dari Madinah Kaus Ganti Presiden 'Dikibarkan' di Mina, Menag: Jemaah Tahan Diri
48	28 Agustus 2018, 11:05	BIN Diledak Intel Melayu, Apa Maksudnya?
49	28 Agustus 2018, 14:32	Jelang Pilpres, Bawaslu Jatim Imbau Masyarakat Tak Provokatif
50	28 Agustus 2018, 16:16	Ini Alasan Ngabaln Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Makar
51	28 Agustus 2018, 16:19	Neno Warisman dan Ahmad Dhani Temui Fadli Zon Bahas Penghadangan

52	28 Agustus 2018, 16:21	JK: #2019GantiPresiden Kampanye yang Belum Waktunya
53	28 Agustus 2018, 19:55	PKB: Hashtag Ganti Presiden Pernah Dipakai di Suriah dan Buat Kacau
54	28 Agustus 2018, 20:27	Mardani Sindir Harga Telur, Tim Jokowi Serang Balik Sandiaga
55	28 Agustus 2018, 23:53	PKPI: #2019GantiPresiden Langgar UUD 1945
56	29 Agustus 2018, 08:50	Ketua Komisi II: #2019GantiPresiden Kampanye Ganti Jokowi
57	29 Agustus 2018, 09:38	Politikus Golkar Kecewa KPU-Bawaslu 'Izinkan' #2019GantiPresiden
58	29 Agustus 2018, 12:41	Istana: Presiden Santai Saja Soal Gerakan #2019GantiPresiden
59	29 Agustus 2018, 14:09	#2019GantiPresiden Dibubarkan, Istana: Tak Ada yang Dipasung
60	29 Agustus 2018, 16:08	Soal #2019GantiPresiden, Kapitra: Bayangkan Seandainya Era Suharto
61	29 Agustus 2018, 17:08	Wantimpres: Polisi Berhak Cegah Benturan di Aksi Ganti Presiden
62	30 Agustus 2018, 09:27	PDIP: #2019KitaBersaudara Tunjukkan Publik Muak #2019GantiPresiden
63	30 Agustus 2018, 17:15	Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden di Banyuwangi Menuai Penolakan
64	31 Agustus 2018, 05:20	Seknas Jokowi Minta Menag Usut Zamzam #2019GantiPresiden
65	31 Agustus	Air Zamzam 'Ganti Presiden', Golkar: Bedakan

	2018, 07:19	Momen Ibadah dan Politik
66	31 Agustus 2018, 07:25	Penolakan #2019GantiPresiden di Berbagai Daerah Berlanjut
67	31 Agustus 2018, 10:06	PSI Heran Air Zamzam Diberi Stiker #2019GantiPresiden
68	31 Agustus 2018, 12:55	Warga Banyuwangi Ancam Bubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden
69	31 Agustus 2018, 16:07	Tak Dapat Izin, Panitia Tunda Deklarasi #2019GantiPresiden di Aceh
70	31 Agustus 2018, 16:34	Diskusi di Daerah Ditolak, Ratna Sarumpaet: Pelecehan Banget
71	31 Agustus 2018, 16:59	Spanduk Tolak #2019GantiPresiden Juga Bertebaran di Ponorogo
72	31 Agustus 2018, 17:40	Zamzam 'Ganti Presiden', PAN: Jangan Dimunculkan Saat Ibadah Haji
73	31 Agustus 2018, 18:14	Ruhut Sindir PKS: Ganti Fahri Aja Nggak Mampu Apalagi Presiden
74	31 Agustus 2018, 19:53	Spanduk Tolak Aksi #2019GantiPresiden Hiasi Sudut Kota Banyuwangi
75	31 Agustus 2018, 20:10	Ma'ruf Amin: Masak Air Zamzam Suruh Ganti Presiden?
76	31 Agustus 2018, 21:44	PDIP: Kurang Pantas Air Zamzam Ditulis 'Ganti Presiden'

b. Pro dan Kontra di Merdeka.com

Tabel 4.3
Berita Pro Gerakan #2019GantiPresiden di Merdeka.com

No	Tanggal	Judul Berita
1	06 Agustus 2018, 04:00	PKS: Kita Bahagia #2019GantiPresiden Diterima Elite Politik
2	25 Agustus 2018, 21:04	Ahmad Dhani Soal Izin Deklarasi #2019GantiPresiden: Gak perlu
3	26 Agustus 2018, 04:26	PAN Heran Polisi Tak Beri Izin Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya
4	26 Agustus 2018, 06:02	Gerakan #2019GantiPresiden Merasa Tak Pernah Cari Keributan
5	26 Agustus 2018, 12:47	Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Ini Saran Sandiaga Buat Neno dan Mardani
6	27 Agustus 2018, 08:18	Aburizal: Tindakan Represif Tolak #2019GantiPresiden Tusuk Jokowi dari Belakang
7	27 Agustus 2018, 18:16	PKS Akui Gerakan #2019GantiPresiden untuk Dukung Prabowo
8	27 Agustus 2018, 20:00	Mardani Bantah Gerakan #2019GantiPresiden Ditunggangi Kepentingan HTI
9	28 Agustus 2018, 10:04	Demokrat: SBY Tak Pernah Belenggu Kebebasan Berpendapat!
10	28 Agustus 2018, 12:24	Rizal Ramli: Pengadangan #2019GantiPresiden Tidak Demokratis
11	28 Agustus 2018, 13:51	Gerindra lihat koalisi Jokowi Khawatir Gerakan #2019GantiPresiden

12	28 Agustus 2018, 17:52	Sandiaga Uno Minta Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Lagi Diadang
13	28 Agustus 2018, 18:44	Bawaslu Sebut Tagar #2019GantiPresiden Bukan Pelanggaran Kampanye
14	28 Agustus 2018, 19:01	PKS Soal #2019GantiPresiden Dituding Tindakan Makar: Ya Enggak Atuh, Ngaco Aja
15	28 Agustus 2018, 19:42	Fadli Zon Usul DPR Ikut Awasi Deklarasi #2019GantiPresiden
16	28 Agustus 2018, 20:40	Fahri Nilai Ngabalın Kurang Baca Karena Anggap #2019GantiPresiden Makar
17	29 Agustus 2018, 12:21	Dipancing Zulkifli Hasan, Mahasiswa Muhammadiyah Pekikan 'Ganti Presiden
18	29 Agustus 2018, 19:50	Din Nilai Pengadangan Aksi #2019GantiPresiden Melanggar Konstitusi
19	30 Agustus 2018, 00:23	Gerindra Sebut Pemerintah Jokowi Belum Mampu Kelola Perbedaan Pendapat
20	30 Agustus 2018, 11:22	Sandiaga Uno Minta Hormati Gerakan #2019GantiPresiden

Tabel 4.4
Berita Kontra Gerakan #2019GantiPresiden di Merdeka.com

No	Tanggal	Judul Berita
1	11 Agustus 2018 17:12	Besok Digelar, Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Tak Dapat Izin
2	12 Agustus 2018 12:56	Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Tak Mendapat Izin
3	14 Agustus 2018 19:48	Kampanyekan #2019GantiPresiden, Neno Warisman & Mardani Ali Sera dipolisikan

4	15 Agustus 2018 15:30	Dilaporkan Atas Kampanye #2019GantiPresiden, Neno Akan Koordinasi Dengan Pengacara
5	16 Agustus 2018 20:13	Muncul Spanduk Menolak Deklarasi Hastag #2019GantiPresiden di Malang
6	21 Agustus 2018 13:05	Mahasiswa Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
7	21 Agustus 2018 15:20	Pemuda Pancasila Minta Polda Riau Larang Deklarasi #2019GantiPresiden
8	24 Agustus 2018 00:32	Aksi di Depan Mapolda Riau, Mahasiswa Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden
9	24 Agustus 2018 12:15	Kapolda Riau Minta Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru Dibatalkan
10	24 Agustus 2018 16:39	Demi Keamanan, Polisi Larang Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya
11	25 Agustus 2018 19:03	PKB Surabaya: Deklarasi #2019GantiPresiden Langgar UU Pemilu
12	25 Agustus 2018, 22:38	Debat Panas Rombongan Ahmad Dhani Dengan Penolak #2019GantiPresiden
13	27 Agustus 2018 16:43	Luhut Soal #2019GantiPresiden Dilarang: Ya Ndakpapa daripada Bentrok
14	27 Agustus 2018 17:33	Ngabalin Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Makar
15	27 Agustus 2018 21:07	Sindir Deklarasi 2019GantiPresiden, Hasto Ingatkan Soal Etika dan Pendidikan Politik
16	27 Agustus 2018 22:08	Penjelasan BIN Soal Pembubaran Massa #2019GantiPresiden di Riau
17	27 Agustus	Ngabalin: Ada pro kontra, Aksi

	2018 22:39	#2019GantiPresiden Bisa Jadi Konflik Horizontal
18	27 Agustus 2018 22:56	BIN Sebut Pembubaran Aksi #2019GantiPresiden untuk Hindari Bentrokan
19	28 Agustus 2018 11:24	Kubu Jokowi Nilai BIN dan Polri Profesional Larang #2019GantiPresiden
20	28 Agustus 2018 13:23	PPP Tak Persoalkan #2019GantiPresiden, Tapi Dugaan Ujaran Kebenciannya
21	28 Agustus 2018 16:05	Wapres JK Nilai Gerakan #2019GantiPresiden Bagian dari Kampanye
22	28 Agustus 2018 18:23	Ngabalin Yakin #2019GantiPresiden Tak Gerus Elektabilitas Jokowi
23	28 Agustus 2018 18:33	Aksi #2019GantiPresiden Cuma Mainan Politik, Tak Bikin Rakyat Kenyang
24	28 Agustus 2018 20:15	Singgung #2019GantiPresiden, Kubu Jokowi Sebut Suriah Kacau Akibat Hastag
25	29 Agustus 2018 05:01	Pimpinan MPR: #2019GantiPresiden Kampanye Negatif Bagi Jokowi
26	29 Agustus 2018 12:18	Jokowi Tanggapi Santai Gerakan #2019GantiPresiden
27	29 Agustus 2018 13:35	Istana: Bukan Polri & BIN yang Hentikan Deklarasi #2019GantiPresiden
28	29 Agustus 2018 18:19	Soal #2019GantiPresiden, Mendagri Bilang Kalau Dibiarkan Terjadi Benturan
29	29 Agustus 2018 19:17	Serukan Ganti Presiden Depan Mahasiswa UMJ, Zulhas Dinilai Curi Start Kampanye
30	30 Agustus	PKS Diminta Tak Gunakan #2019GantiPresiden

	2018 12:06	untuk Tipu Rakyat
31	30 Agustus 2018 18:43	Ormas Tolak Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung Datang ke Palembang

2. Frekuensi Penyajian Berita

Tabel 4.5
Frekuensi Penyajian Berita

Penyajian Berita	Detikcom		Merdeka.com	
	F	P (%)	F	P (%)
Jumlah Berita Pro	47	33,09	20	27,39
Jumlah Berita Kontra	76	53,52	31	42,46
Jumlah Berita Netral	19	13,38	22	30,13
Total Berita	142	99,99	73	99,98

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah berita kedua media online tersebut tidak berimbang. Terdapat 142 berita gerakan #2019GantiPresiden di Detikcom, sedangkan di Merdeka.com sebanyak 73 berita. Adapun frekuensi penyajian berita di Detikcom yakni 47 (33,09%) berita pro dan 76 (53,53%) berita kontra. Sedangkan frekuensi penyajian berita di Merdeka.com yakni 20 (27,39%) berita pro dan 31 (42,46%) berita kontra.

Ketika menghitung frekuensi berita, penulis menggunakan cara penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Berita Pro atau Kontra}}{\text{Jumlah Keseluruhan Berita}} \times 100\% = \dots\%$$

3. Frame Detikcom

a. *Problem Identification (Identifikasi Masalah)*

Media online Detikcom mengidentifikasi kasus pro dan kontra gerakan #2019GantiPresiden ini adalah masalah politik. Permasalahan politik tersebut di antaranya berupa dugaan ujaran kebencian terhadap presiden Jokowi, dugaan makar, adanya unsur provokasi, dan kampanye sebelum waktunya.

Tabel 4.6
Analisis Framing Detikcom Agustus 2018

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber Berita
Dukung MUI Jabar Tolak #2019GantiPresiden, PDIP: Cara Barbar Tinggalkan. Edisi 02 Agustus 2018	Abdy berpendapat cara-cara yang barbar seperti gerakan #2019GantiPresiden harus dihindari dikarenakan tidak sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia.	Abdy Yuhana (Sekretaris DPD PDIP Jabar)
Sikap MUI Jabar Lawan Gerakan #2019GantiPresiden. Edisi 03 Agustus 2018	Wawancara Detikcom dengan berbagai sumber berita. Rafani Achyar, Rachmat Syafei, dan Abdy Yuhana menyikapi agar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tidak dilakukan di Jabar, sedangkan Mulyadi menyangkan sikap tersebut.	Rafani Achyar (Sekretaris MUI Jabar), Rachmat Syafei (Ketua MUI Jabar), Mulyadi (Ketua DPD Partai Gerindra), dan Abdy Yuhana (Sekretaris PDIP Jabar)

<p>Mahasiswa Bandung Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden. Edisi 16 Agustus 2018</p>	<p>Pengecamanaaksi pemukulan yang dilakukan kelompok deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Makassar terhadap aktivis PMII dan adanya dugaan gerakan tersebut ditunggangi oleh oknum anggota HTI yang telah resmi dibubarkan.</p>	<p>Dohir (Koordinator aksi)</p>
<p>Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Mahasiswa Ngeluruk Polda Jatim. Edisi 24 Agustus 2018</p>	<p>"Kami minta agar Polda Jatim untuk tidak memberikan izin. Jika itu tetap diberikan izin atau terjadi deklarasi itu, tidak menutup kemungkinan di Jawa Timur politiknya akan tercemari dan akan terpecah belah."</p>	<p>M. Choiron (Koordinator Aksi)</p>
<p>Tak Beri Izin Aksi #2019GantiPresiden, Polri: Belum Masa Kampanye. Edisi 26 Agustus 2018</p>	<p>Kegiatan #2019GantiPresiden boleh dilakukan, akan tetapi pada saat masa kampanye dimulai.</p>	<p>Irjen Setyo Wasisto (Kadiv Humas Polri)</p>

<p>Soal #2019GantiPresiden, NasDem: Neno yang Persekusi Presiden! Edisi 26 Agustus 2018</p>	<p>NasDem menilai bahwa Neno Warisman mempersekusi presiden yang sah dan masih menjabat yakni Presiden Joko Widodo.</p>	<p>Irma Suryani Chaniago (Ketua DPP NasDem)</p>
<p>Bubarkan #2019GantiPresiden, Polisi: Penyampaian Pendapat Diatur UU. Edisi 26 Agustus 2018</p>	<p>Penyampaian pendapat seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Kombes Rudi Setiawan (Kapolrestabes Surabaya)</p>
<p>PSI: #2019GantiPresiden Sebar Kebencian ke Presiden. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Wawancara dengan Raja Juli Antoni, Sekjen PSI. Toni menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden menyebarkan kebencian terhadap presiden yang masih menjabat.</p>	<p>Raja Juli Antoni (Sekjen Partai Solidaritas Indonesia)</p>
<p>PKB: #2019GantiPresiden Jelas Ada Unsur Kebencian. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>“Tagar ganti presiden, niat mengganti presiden jelas ada. Ada unsur kebencian.” "Jadi kalau ada upaya mengganti presiden tidak pada jalur demokrasi dan konstitusi yang ada maka itu dapat diduga upaya makar.”</p>	<p>Abdul Kadir Karding (Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa)</p>

<p>NasDem: #2019GantiPresiden Kebebasan Berpendapat yang Keliru. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Menurut Johnny, gerakan #2019GantiPresiden tidak sesuai dengan konstitusi.</p>	<p>Johnny G. Plate (Sekjen Partai NasDem)</p>
<p>Jubir Istana: #2019GantiPresiden Makar! Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>"Kenapa? Terhitung tanggal 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB, presiden harus diganti. Sementara 27 April baru pemilu. Pemilu itu bukan ganti presiden, pemilu itu adalah pemilihan presiden baru. Oke?"</p>	<p>Ali Mochtar Ngabalin (Tenaga Ahli Utama Kedepuitan IV Kantor Staf Kepresidenan)</p>
<p>Hanura: Deklarasi #2019GantiPresiden Sengaja Melanggar UU. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Inas menuding gerakan #2019GantiPresiden melanggar UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.</p>	<p>Inas Nasrullah (Ketua DPP Hanura)</p>
<p>OSO soal #2019GantiPresiden: Belum Kampanye Sudah Lakukan Kebencian. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Oesman menilai gerakan #2019GantiPresiden bermuatan kampanye. Namun, belum saatnya melakukan kampanye.</p>	<p>Oesman Sapta Odang (Ketua Umum Hanura)</p>

<p>Golkar: Gerakan #2019GantiPresiden Cara Curi Start Kampanye. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Wawancara Detikcom dengan Ace Hasan Syadzily. Ace menilai gerakan #2019GantiPresiden mencuri start kampanye dengan tidak menyebut siapa capres yang didukung.</p>	<p>Ace Hasan Syadzily (Ketua DPP Golkar)</p>
<p>PKPI: #2019GantiPresiden Langgar UUD 1945. Edisi 28 Agustus 2018</p>	<p>Menurut Verry, gerakan #2019GantiPresiden melanggar konstitusi dan kontraproduktif bagi demokrasi Indonesia.</p>	<p>Verry Surya Hendrawan (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)</p>
<p>Ketua Komisi II: #2019GantiPresiden Kampanye Ganti Jokowi. Edisi 29 Agustus 2018</p>	<p>"#2019GantiPresiden adalah seruan, yaitu seruan untuk mengganti Presiden yang sekarang. Apalagi Presiden yang sedang menjabat sekarang Pak Jokowi mencalonkan diri kembali untuk Pilpres 2019," ucap Amali.</p>	<p>Zainudin Amali (Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar)</p>
<p>Warga Banyuwangi Ancam Bubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden. Edisi 31 Agustus 2018</p>	<p>Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai menilai kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden penuh ujaran kebencian terhadap Presiden.</p>	<p>Eko Sukartono (Salah satu orator) dan Hermanto (Koordinator aksi Masyarakat Banyuwangi Cinta Damai)</p>

Spanduk Tolak Aksi #2019GantiPresiden Hiasi Sudut Kota Banyuwangi Edisi 31 Agustus 2018	Warga Kampung Mandar menolak deklarasi #2019GantiPresiden karena tidak ingin dikotori dengan hasutan dan ujaran kebencian terhadap Presiden.	Mujiono (Warga Kampung Mandar)
---	---	--------------------------------------

b. Causal Interpretation (Identifikasi Penyebab Masalah)

Dalam berita Detikcom, massa pro gerakan #2019GantiPresiden diposisikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Di sini letak dan awal masalah berasal dari masifnya gerakan #2019GantiPresiden yang menimbulkan penolakan di sejumlah daerah terhadap aksi serta deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Sebaliknya, presiden yang masih menjabat diposisikan sebagai korban. Ini misalnya dapat dilihat dari wawancara Detikcom dengan Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia.

"Meminjam istilah Prof Dr Jimly Asshiddiqie, gerakan politik ini adalah gerakan 'menyebarkan kebencian terhadap presiden yang masih menjabat'. Itu sangat potensial menuai reaksi penolakan karena Presiden Jokowi merupakan presiden yang dicintai rakyat," ucap Toni.³⁶

Menurut Toni, presiden yang masih menjabat yaitu Joko Widodo sudah memberikan kinerja yang terbaik. Toni juga

³⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4183920/psi-2019gantipresiden-sebar-kebencian-ke-presiden>, diakses pada 1 September 2019, pukul 03:47 WIB.

berpendapat bahwa gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk kampanye negatif yang mulai berubah menjadi kampanye hitam. Dari kutipan wawancara Detikcom dengan Toni, memperjelas bahwa gerakan #2019GantiPresiden mendapatkan reaksi penolakan karena dinilai menyebarkan kebencian terhadap presiden yang masih menjabat.

c. Moral Evaluation (Evaluasi Moral)

Penilaian atas massa pro gerakan #2019GantiPresiden sebagai sumber masalah didukung oleh tanggapan dari berbagai pihak yang kontra terhadap gerakan tersebut. Satu di antaranya, wawancara Detikcom dengan Zainudin Amali selaku Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar.

"#2019GantiPresiden adalah seruan, yaitu seruan untuk mengganti Presiden yang sekarang. Apalagi Presiden yang sedang menjabat sekarang Pak Jokowi mencalonkan diri kembali untuk Pilpres 2019," ucap Amali.

"Dengan demikian seruan untuk ganti presiden 2019 sama artinya seruan jangan memilih Pak Jokowi kembali. Itu sama saja dengan mengkampanyekan ganti Pak Jokowi atau ganti Presiden Jokowi 2019," ucap Amali.³⁷

Meski KPU dan Bawaslu sudah berpendapat bahwa gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar aturan dan tidak masuk dalam definisi kampanye, akan tetapi Zainudin Amali memiliki

³⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4187196/ketua-komisi-ii-2019gantipresiden-kampanye-ganti-jokowi>, diakses pada 6 September 2019, pukul 20:48 WIB.

pendapat lain. Menurut Amali, sebagaimana kutipan wawancaranya dengan Detikcom, gerakan #2019GantiPresiden bersifat seruan yang tergolong dalam kampanye untuk ganti Pak Jokowi atau ganti Presiden Jokowi 2019. Sehingga Amali berpesan agar kampanye tersebut dilakukan sesuai pada waktunya yakni tanggal 23 September 2018-13 April 2019.

d. Treatment Recommendation (Rekomendasi Penyelesaian Masalah)

Atas semua yang telah dilakukan oleh massa yang pro dan massa yang kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden berupa aksi serta deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dan berbagai penolakannya, beberapa narasumber merekomendasikan agar gerakan #2019GantiPresiden hanya dilakukan pada masa kampanye.

Tabel 4.7

Frame: Kasus Gerakan #2019GantiPresiden adalah Masalah Politik

<i>Problem Identification</i>	Masalah Politik
<i>Causal Interpretation</i>	Massa yang melakukan aksi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden adalah penyebab, sedangkan presiden Jokowi sebagai korban ujaran kebencian dan kampanye sebelum waktunya.
<i>Moral Evaluation</i>	Gerakan #2019GantiPresiden seruan untuk mengganti Presiden Jokowi.
<i>Treatment Recommendation</i>	Gerakan #2019GantiPresiden hanya dilakukan pada masa kampanye.

4. Frame Merdeka.com

a. *Problem Identification (Identifikasi Masalah)*

Media online Merdeka.com mengidentifikasi kasus pro dan kontra gerakan #2019GantiPresiden ini adalah masalah etika. Permasalahan etika didasari karena aksi dan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sehingga dapat mengganggu kondusivitas masyarakat umum.

Tabel 4.8
Analisis Framing Merdeka.com Agustus 2018

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber Berita
Mahasiswa Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Edisi 21 Agustus 2018	Tidak diberikan izin pelaksanaan deklarasi karena mempertimbangkan kestabilan situasi Pekanbaru dan deklarasi dinilai bermuatan politik serta tidak pantas dilakukan.	Kombes Trijan Faisal (Direktur Intelijen Polda Riau) 80 Sefat (Ketua Ikatan Keluarga Nias Riau).
Demi Keamanan, Polisi Larang Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Edisi 24 Agustus 2018	"Kalau tetap dilaksanakan berarti ada undang-undang yang dilanggar. Maka kami akan melakukan eskalasi di lapangan untuk tindakan selanjutnya, kami akan bergerak demi ketertiban masyarakat luas."	Frans Barung Mangera (Komisaris Besar Polisi)

<p>Luhut Soal #2019GantiPresiden Dilarang: Ya Ndakpapa daripada Bentrok. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Menurut Luhut, deklarasi gerakan #2019GantiPresiden bisa memicu kegaduhan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak represif dan tidak antikritik.</p>	<p>Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman)</p>
<p>Ngabalin: Ada pro kontra, Aksi #2019GantiPresiden Bisa Jadi Konflik Horizontal. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Ngabalin berpendapat bahwa gerakan #2019GantiPresiden mengganggu kondusivitas negara.</p>	<p>Ali Mochtar Ngabalin (Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden)</p>
<p>Ngabalin: Ada pro kontra, Aksi #2019GantiPresiden Bisa Jadi Konflik Horizontal. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Ngabalin berpendapat bahwa gerakan #2019GantiPresiden mengganggu kondusivitas negara.</p>	<p>Ali Mochtar Ngabalin (Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden)</p>
<p>Penjelasan BIN Soal Pembubaran Massa #2019GantiPresiden di Riau. Edisi 27 Agustus 2018</p>	<p>Mempertimbangkan gerakan #2019GantiPresiden yang tidak memiliki izin melakukan aksi di Riau dan situasi memanas, maka BIN melakukan pembubaran aksi massa.</p>	<p>Wawan Hari Purwanto (Juru Bicara Kepala BIN)</p>

Kubu Jokowi Nilai BIN dan Polri Profesional Larang #2019GantiPresiden. Edisi 28 Agustus 2018	Ahmad Rofiq menilai bahwa BIN dan Polri sudah bergerak secara professional melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.	Ahmad Rofiq (Sekretaris Jenderal Partai Perindo)
Soal #2019GantiPresiden, Mendagri Bilang Kalau Dibiarkan Terjadi Benturan. Edisi 29 Agustus 2018	Tjahjo menyampaikan bahwa BIN memulangkan deklarator #2019GantiPresiden yakni Neno Warisman karena adanya indikasi akan terjadi benturan.	Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri)
PKS Diminta Tak Gunakan #2019GantiPresiden untuk Tipu Rakyat. Edisi 30 Agustus 2018	"Pak Mardani, sudahlah, jangan bohongi rakyat tentang ekonomi dan tagar ini, kasihan rakyat disuguhi permainan tidak jujur para elite."	Dedek Prayudi (Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia)
Ormas Tolak Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung Datang ke Palembang. Edisi 30 Agustus 2018	"Kami khawatir mereka membuat kekacauan di Palembang, apalagi sekarang ada Asian Games. Jadi kami imbau jangan digelar di sini."	Andreas OP (Koordinator Aliansi Sipil Palembang)

b. Causal Interpretation (Identifikasi Penyebab Masalah)

Dalam berita Merdeka.com, massa pro gerakan #2019GantiPresiden diposisikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Sedangkan masyarakat pada umumnya menjadi korban karena adanya gerakan tersebut.

c. Moral Evaluation (Evaluasi Moral)

Permasalahan etika yang ditimbulkan oleh aksi dan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden memunculkan berbagai tindakan dari aparat keamanan yang berwenang. Contohnya pembubaran aksi #2019GantiPresiden oleh Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Riau dan tidak diberikannya izin aksi dua pihak yang berbeda oleh Polda Jawa Timur.

"Iya (sudah tepat). Itu upaya kita untuk menghindarkan benturan, karena memang tidak ada izin. Lalu, situasi sudah memanas, sehingga harus dilakukan upaya penanganannya," kata dalam konferensi Pers di Jakarta Selatan, Senin (27/8).³⁸

Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) berpendapat bahwa tindakan BIN daerah Riau membubarkan aksi massa #2019GantiPresiden di Riau yang dihadiri oleh Neno Warisman merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar undang-undang. Tindakan pembubaran tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Senada dengan tindakan BIN daerah Riau yang membubarkan pelaksanaan aksi gerakan #2019GantiPresiden untuk menghindarkan terjadinya benturan, pihak Polda Jawa Timur tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), sehingga tidak ada izin bagi dua pihak berbeda yang

³⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-bin-soal-pembubaran-massa-2019gantipresiden-di-riau.html>, diakses pada 05 Juli 2019, pukul 23:41 WIB.

rencananya akan melakukan kegiatan di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018.

"Kalau tetap dilaksanakan berarti ada undang-undang yang dilanggar. Maka kami akan melakukan eskalasi di lapangan untuk tindakan selanjutnya, kami akan bergerak demi ketertiban masyarakat luas," ucapnya.³⁹

Alasan tidak diberikan izin karena dua pihak yaitu pihak pendukung Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dan pendukung Joko Widodo- KH Ma'ruf Amin yang akan melakukan aksi di lokasi yang sama. Polda Jawa Timur menilai jika diberikan izin pelaksanaan maka berpotensi terjadinya kerusuhan.

d. Treatment Recommendation (Rekomendasi Penyelesaian Masalah)

Untuk menjaga kondusivitas masyarakat, beberapa narasumber dalam pemberitaan Merdeka.com menyarankan agar massa pro gerakan #2019GantiPresiden tidak diperbolehkan melaksukan aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah di Indonesia yang terdapat massa kontra, agar tidak menimbulkan kerusuhan.

³⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/demi-keamanan-polisi-larang-deklarasi-2019gantipresiden-di-surabaya.html>, diakses pada 30 Mei 2020, pukul 12:10 WIB.

Tabel 4.9
Frame: Kasus Gerakan #2019GantiPresiden adalah Masalah Etika

<i>Problem Identification</i>	Masalah Etika
<i>Causal Interpretation</i>	Massa pro gerakan #2019GantiPresiden diposisikan sebagai penyebab, sedangkan keamanan masyarakat pada umumnya menjadi korban karena adanya gerakan tersebut.
<i>Moral Evaluation</i>	Gerakan #2019GantiPresiden berpotensi menimbulkan kerusuhan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Massa pro gerakan #2019GantiPresiden tidak diperbolehkan melakukan aksi dan deklarasi di sejumlah daerah di Indonesia yang terdapat massa kontra, agar tidak menimbulkan kerusuhan.

5. Perbandingan Frame Detikcom dan Merdeka.com

Ketika masalah gerakan #2019GantiPresiden dilihat sebagai masalah politik, aktor penyebab adalah massa pro gerakan #2019GantiPresiden. Begitu juga ketika dilihat sebagai masalah

etika, massa pro gerakan #2019GantiPresiden sebagai aktor penyebab. Yang berbeda adalah korbannya. Ketika dilihat sebagai masalah politik, presiden Joko Widodo sebagai korban ujaran kebencian dan kampanye sebelum waktunya, sedangkan jika dilihat sebagai masalah etika, masyarakat umum yang menjadi korban akibat berpotensi kerusuhan.

Pada akhirnya frame yang berbeda berimbas pada bagaimana masing-masing media merekomendasikan penyelesaian masalah. Detikcom mengusulkan agar gerakan #2019GantiPresiden dilakukan pada masa kampanye. Sedangkan Merdeka.com melalui wawancara dengan beberapa narasumber, mengusulkan massa pro gerakan #2019GantiPresiden tidak diperbolehkan melakukan aksi dan deklarsi di sejumlah daerah di Indonesia yang terdapat massa kontra agar tidak menimbulkan kerusuhan.

Tabel 4.10
Perbandingan Frame Detikcom dan Merdeka.com

Elemen	Detikcom	Merdeka.com
<i>Frame</i>	Kasus gerakan #2019GantiPresiden adalah masalah politik.	Kasus gerakan #2019GantiPresiden adalah masalah etika.
<i>Problem Identification</i>	Masalah politik	Masalah etika
<i>Causal Interpretation</i>	Massa yang melakukan aksi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden adalah penyebab,	Massa pro gerakan #2019GantiPresiden diposisikan sebagai penyebab, sedangkan

	sedangkan presiden Jokowi sebagai korban ujaran kebencian dan kampanye sebelum waktunya.	keamanan masyarakat pada umumnya menjadi korban karena adanya gerakan tersebut.
<i>Moral Evaluation</i>	Gerakan #2019GantiPresiden seruan untuk mengganti Presiden Jokowi.	Gerakan #2019GantiPresiden berpotensi menimbulkan kerusuhan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Gerakan #2019GantiPresiden hanya dilakukan pada masa kampanye.	Massa pro gerakan #2019GantiPresiden tidak diperbolehkan melakukan aksi dan deklarasi di sejumlah daerah di Indonesia yang terdapat massa kontra.